

DAMPAK KEBIJAKAN DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KOTA TASIKMALAYA

Beni Hartanto

STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: *benihart1973@gmail.com

ABSTRAK

Pendidikan merupakan bagian penting dalam kemajuan sebuah bangsa, sehingga telah banyak kebijakan dibuat dalam menyelesaikan berbagai persoalan terkait dengan dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan proses pengembangan seseorang untuk memiliki pengetahuan yang luas, ilmu yang mumpuni, memiliki pemikiran kritis, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Disamping itu, melalui pendidikan membantu seseorang memenuhi kualifikasi dalam bidang pekerjaan tertentu dan membuat lebih mungkin untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Setiap orangtua menginginkan anaknya mendapatkan pendidikan yang baik, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk mencapai cita-cita anaknya. Penelitian bertujuan untuk menganalisis tentang dampak kebijakan terkait dengan penerapan system zonasi dalam penerimaan siswa baru khususnya tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri di Kota Tasikmalaya. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan tujuan menggambarkan dan menganalisis dampak kebijakan dalam penerimaan calon siswa baru pada tingkat SMP Negeri di Kota Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, dengan teknik analisis data melalui pengumpulan data sesuai dengan objek penelitian yang kemudian diberikan penjelasan dan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dengan adanya system zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dampak yang ditimbulkan adanya siswa-siswa yang berpindah alamat dengan menumpang kepada sanak saudara, ataupun dengan menumpang alamat kepada pihak lain yang dekat dengan sekolah yang menjadi tujuan, serta melakukan berbagai upaya agar dapat diterima di sekolah tujuannya.

Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan dan System Zonasi.

PENDAHULUAN

Pendidikan memiliki peran penting dalam pembangunan sebuah bangsa termasuk dalam aspek ekonomi, karena dengan pendidikan akan cenderung meningkatkan produktivitas dan kreativitas, serta merangsang kewirausahaan dengan berbagai terobosan teknologi, dimana semua faktor tersebut mengarah pada produksi dan pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Kemajuan sebuah negara ditentukan oleh bagaimana proses pendidikan dilakukan dan dilaksanakan dalam mencapai tujuan yang telah dicita-citakan. Pendidikan memungkinkan anak-anak untuk memperoleh keterampilan akademik yang diperlukan untuk menafsirkan situasi kehidupan, mengembangkan pemikiran kritisnya dan membuat keputusan

terbaik. Pendidikan membantu orang lebih memahami hubungan sosial, kebutuhan dan perilaku orang lain.

Pendidikan memiliki penting dalam mencapai keberhasilan seseorang, sehingga dengan pendidikan membuat siswa kuat secara fisik dan mental. Pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masyarakat karena orang yang terdidik memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan kepuasan. Pendidikan merupakan proses holistik tidak hanya pertumbuhan pribadi, tetapi juga memperkaya pertumbuhan masyarakat dan bangsa, dimana hal tersebut sebagai dasar dari pembangunan suatu bangsa. Kaum muda yang terdidik memiliki kemampuan untuk berpikir di luar kehidupannya yang stagnan dan berkontribusi pada pengembangan masyarakat. Pendidikan berkualitas dapat membekali anak-anak dan remaja untuk menyongsong masa depan yang lebih baik.

Melalui pendidikan dapat menjadi pendorong utama untuk mengurangi kemiskinan, mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai kesetaraan gender dan pembangunan sosial. Pendidikan sangat penting untuk kemajuan bangsa, karena melalui pendidikan, budaya meritokrasi dapat diimplementasikan, dimana hal tersebut akan menciptakan masyarakat yang mampu bersaing dan memiliki keunggulan. Meritokrasi penting karena posisi kritis di sektor swasta dan publik dapat diisi oleh orang-orang yang kompeten yang dapat melakukan tugas pembangunan bangsa. Pendidikan dianggap sebagai elemen terpenting dalam pembangunan bangsa, dimana melalui proses pendidikan, suatu bangsa mengembangkan dan meningkatkan kesadaran diri, dalam hal ini dilakukan dengan mempersiapkan dan mendidik individu-individunya yang merupakan bagian dari sebuah bangsa, dan pendidikan bukan hanya proses instruksional, tetapi proses sosial

Berbagai kebijakan terkait dengan pendidikan di Indonesia telah diterbitkan melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengatur segala sesuatunya berjalan dengan baik. Istilah kebijakan menurut Dye (1972) yang dapat diartikan: "Kebijakan publik sebagai segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Kebijakan dapat juga disebut sebagai hukum, peraturan, prosedur, tindakan administratif, arahan atau tindakan dari pemerintah dan lembaga lain. Setiap kebijakan yang dibuat memuat tentang maksud dan tujuan yang dilanjutkan dengan strategi-strategi dalam pelaksanaan pencapaian tujuan tersebut.

Pemerintah memiliki peran penting dalam memajukan pendidikan, salah satunya dengan membuat berbagai kebijakan agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik menuju cita-cita. Kebijakan dalam bidang pendidikan yang dibuat tentu harus berdasarkan kebutuhan masyarakat agar dapat mendapatkan pendidikan dan hak yang sama. Definisi tentang pembuatan kebijakan (Pal, 2013) memberikan definisi yang diartikan: "Pembuatan kebijakan adalah seni mengembangkan dalam menanggapi terhadap masalah publik". Berdasarkan pendapat tersebut kebijakan yang dibuat oleh pemerintah merupakan tanggapan dari persoalan-persoalana atau masalah-masalah yang dihadapi oleh publik untuk dicarikan jalan keluarnya.

Kebijakan pendidikan adalah kebijakan publik bidang pendidikan (Tilaar, 2008). Kebijakan pendidikan merupakan hal yang penting dalam proses pencapaian tujuan pendidikan nasional, sehingga diperlukan pemahaman konsep dasar kebijakan pendidikan agar dapat menghasilkan kebijakan pendidikan yang proaktif dan pemecahan masalah. Pendekatan implementasi kebijakan pendidikan terdiri dari pendekatan struktural, pendekatan prosedural dan manajerial, pendekatan perilaku dan pendekatan politik (Fadiyah, dkk. 2021).

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah untuk melakukan pemerataan dalam upaya mendapatkan pelayanan pendidikan yang sama bagi para siswa. Melalui Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo Permendikbud No. 20 Tahun 2019 yang telah diubah menjadi Permendikbud No. 44 Tahun 2019, dimana dalam peraturan tersebut memberikan fleksibilitas kepada daerah dalam menentukan alokasi untuk siswa masuk ke Sekolah melalui jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orangtua/wali, atau jalur lainnya (dapat berupa jalur prestasi). Tujuan sistem zonasi antara lain pemerataan akses pendidikan bagi siswa, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, penghapusan eksklusivitas dan diskriminasi khususnya pada sekolah negeri, dan membantu menghitung kebutuhan dan alokasi guru.

Setiap kebijakan yang dibuat akan memiliki dampak, dimana dengan adanya peraturan sebagaimana dikemukakan di atas menimbulkan berbagai persoalan baru. Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan perubahan dan penyesuaian agar proses pendidikan lebih demokratis, memperhatikan keragaman, kebutuhan daerah dan siswa serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat (Abdul Rozak, 2021). Sebuah kebijakan perlu dilakukan analisis secara kritis untuk dilakukan evaluasi terhadap dampak-dampak yang mungkin tidak tercakup dalam kebijakan tersebut untuk lebih menyempurnakan.

Analisis kebijakan pendidikan mengacu pada bentuk studi kebijakan pendidikan di mana fokusnya adalah mengungkap inkonsistensi antara apa yang dikatakan kebijakan dan apa yang dilakukan kebijakan, terutama dalam hal hubungan kekuasaan yang terjadi di masyarakat (Diem, Young, Welton, Mansfield, & Lee, 2014). Kebijakan publik bersifat dinamis dan mengharuskan pembuat kebijakan menyesuaikan kebijakan dengan kondisi dan kebutuhan yang berubah. Analisis kebijakan diperlukan untuk mengetahui sejauhmana kebijakan yang dilaksanakan memberikan dampak yang diharapkan.

Instansi pemerintah yang umumnya sebagai pelaksana kebijakan, dimana dalam hal ini Dinas Pendidikan dan SMP Negeri di Kota Tasikmalaya sebagai pelaksana kebijakan terkait dengan PPDB memerlukan analisis dari dampak yang ditimbulkan, dimana baik orang tua, maupun calon siswa yang memiliki tujuan terhadap sekolah tertentu sebagai tujuan melanjutkan sekolahnya menggunakan berbagai cara agar dapat diterima terutama terhadap sekolah-sekolah yang dijadikan favorite atau memiliki keunggulan dibandingkan dengan sekolah lainnya. Analisis dampak kebijakan mengkaji perubahan indikator utama yang terjadi sejak implementasi

kebijakan dan sejauh mana perubahan tersebut dapat dikaitkan dengan kebijakan tersebut.

METODE

Metode yang digunakan yaitu deskriptif, dimana bertujuan untuk mengamati dan menggambarkan perilaku subjek tanpa mempengaruhinya dengan cara apa pun, dalam hal ini terkait dengan kebijakan bidang pendidikan. Hasil penelitian deskriptif tidak dapat digunakan sebagai jawaban pasti atau untuk menjawab hipotesis, tetapi jika batasan-batasan dapat dipahami, maka dapat menjadi alat yang berguna di banyak bidang penelitian ilmiah lainnya.

Adapun penggunaan metode deskriptif sesuai dengan tujuan penelitian untuk mengungkap secara jelas tentang fenomena yang terjadi berkaitan dengan dampak kebijakan khususnya system zonasi pada PPDB di tingkat SMP Negeri di Kota Tasikmalaya. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dan pengamatan di lapangan. Analisis data dilakukan melalui studi dokumentasi dan data lapangan yang selanjutnya diberikan penjelasan dilanjutkan dengan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendidikan memainkan peran utama dalam kehidupan modern saat ini, dimana pendidikan telah menjadi aspek yang paling penting untuk pembangunan. Perkembangan dunia pendidikan semakin hari semakin meningkat, hal tersebut sejalan dalam mencapai keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Pendidikan memberikan banyak dukungan dan mendorong setiap individu untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam mencapai tujuan hidupnya, sehingga dapat dikatakan pendidikan merupakan aset terbesar untuk mencapai kemajuan. Fakta yang menakjubkan bahwa pendidikan memegang tempat tertinggi, sehingga setiap sekolah berlomba untuk meningkatkan kualitas pendidikannya.

Sebagai upaya pemerataan dan memberikan kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan, Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan peraturan tentang PPDB, dimana terdapat perubahan terkait dengan besaran setiap jalur untuk dapat diterima di sebuah sekolah. Pada Permendikbud No. 51 Tahun 2018 jo Permendikbud No. 20 Tahun 2019 ditetapkan untuk jalur zonasi minimum 80%, jalur prestasi paling tinggi sebesar 15%, dan jalur perpindahan orangtua/wali paling banyak sebesar 5%, sementara berdasarkan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 terjadi perubahan untuk jalur zonasi minimum 50%, jalur afirmasi minimum 15%, jalur perpindahan orangtua/wali paling banyak sebesar 5%, dan jika ada sisa kuota, jalur prestasi dapat dibuka, bisa berdasarkan UN ataupun prestasi akademik dan non-akademik lainnya paling banyak sebesar 30%.

Penelitian ini fokus terhadap fenomena yang terjadi dalam PPDB tingkat SMP Negeri di Kota Tasikmalaya, dimana Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki 21 sekolah SMP Negeri, yang selalu menjadi tujuan dari calon siswa untuk dapat diterima di sekolah tersebut. Namun demikian fenomena yang terjadi, masih

melekatnya pandangan terhadap SMP Negeri unggulan atau favorite yang berebut untuk dapat diterima di sekolah tersebut, diantaranya SMP Negeri 1, SMP Negeri 2 dan SMP Negeri 5 yang masih dianggap lebih unggul dibandingkan yang lainnya, sehingga para calon siswa berebut untuk dapat diterima di sekolah-sekolah tersebut dengan melalui berbagai jalur yang memungkinkan dapat diterima.

Berdasarkan hasil informasi yang diperoleh dari beberapa Kepala Sekolah SMP Negeri yang secara umum dianggap memiliki keunggulan atau sekolah favorite dibandingkan dengan SMP Negeri lainnya menjelaskan bahwa paradigma terhadap SMP Negeri unggulan tetap melekat pada masyarakat terutama para orang tua dan dari para calon siswa. Pihak sekolah sendiri yang dianggap memiliki keunggulan atau sekolah favorite tersebut, memiliki beban berat dan tanggungjawab yang besar untuk tetap dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pendidikan bagi para siswanya dengan adanya pandangan sebagai SMPN Negeri unggulan atau sekolah favorite yang telah melekat di lingkungan masyarakat. Sekolah yang memiliki keunggulan atau sering disebut sebagai sekolah favorite tentu menjadi tujuan dari para calon siswa maupun orang tua agar anaknya dapat memperoleh pendidikan yang lebih baik dan berkualitas.

Penyerapan siswa didik di seluruh SMP Negeri di Kota Tasikmalaya pada periode 2021/2022, melalui jalur afirmasi sebanyak 1.005 siswa, jalur prestasi nilai kelulusan sebanyak 531 siswa, jalur prestasi kejuaraan sebanyak 531 siswa, jalur prestasi tahfidzul Qur'an sebanyak 203 siswa, jalur prestasi pramuka sebanyak 58 siswa, jalur perpindahan kedinasan orang tua sebanyak 328 siswa, dan jalur zonasi sebanyak 4.230 siswa (<https://arsip.siap-ppdb.com/2021/tasikmalaya/#/02>). Jalur zonasi merupakan quota paling banyak yang diberikan oleh setiap sekolah meskipun terdapat penurunan dari tahun sebelumnya, dimana hal tersebut sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019.

Fenomena yang terjadi dengan masih cukup besarnya quota jalur zonasi, menjadikan para orang tua khususnya, dimana agar anaknya dapat diterima di sekolah-sekolah unggulan, memindahkan alamat anaknya ke saudara, kerabat atau menitipkannya ke keluarga lain dengan memasukannya melalui Kartu Keluarga agar dapat masuk jalur zonasi. Fenomena lainnya bagi calon siswa yang dekat atau masuk dalam zonasi ke sekolah-sekolah yang dianggap memiliki keunggulan atau sekolah favorite kurang memiliki semangat belajar dibandingkan dengan calon siswa diluar zonasi, karena beranggapan dipastikan dapat diterima oleh sekolah tersebut. Disamping itu, masih adanya praktek-praktek yang melibatkan berbagai pihak agar calon siswa dapat diterima oleh sekolah yang menjadi tujuannya.

Berdasarkan fenomena yang terjadi, diperlukan strategi bagi oleh Dinas Pendidikan maupun oleh pihak sekolah, agar calon siswa tetap memiliki semangat yang tinggi untuk belajar terutama calon siswa yang berada dekat dengan sekolah maupun sudah masuk dalam zonasi sebagaimana yang telah ditentukan. Kembali kepada konsep utama pendidikan yaitu kegiatan yang dilakukan secara terarah ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, seperti transfer pengetahuan atau pengembangan keterampilan dan karakter. Tujuan tersebut termasuk

mengembangkan pemahaman, rasionalitas, kebaikan, dan kejujuran. Pendidikan aspek utama dari perkembangan setiap masyarakat modern, dimana dengan pendidikan akan mengarahkan untuk mengikuti jalan yang benar setiap saat dalam hidup.

Pada umumnya seseorang yang berpendidikan tinggi selalu dapat menangani berbagai hal secara mandiri, dapat menjalani hidupnya dengan nyaman. Pendidikan membuat siswa kuat secara fisik dan mental, dimana pendidikan merupakan investasi terbaik bagi masyarakat dikarenakan seseorang yang terdidik memiliki lebih banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan kepuasan. Pendidikan faktor utama yang menyediakan lapangan kerja, oleh karena itu memainkan peran penting dalam pembangunan negara dan juga dalam meningkatkan pendapatan per kapita negara.

Pendidikan sebagai senjata terbaik untuk mengentaskan kemiskinan. Pendidikan mempromosikan pengetahuan dan pemahaman di masyarakat pedesaan. Pendidikan adalah satu-satunya cara untuk mempertahankan kesuksesan dalam hidup. Ini meningkatkan nilai-nilai etika orang tersebut. Pendidikan bukan hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar tentang kehidupan, dimana hal ini dengan cepat meningkatkan keterampilan dan kesadarannya. Dengan adanya peraturan tentang PPDB diharapkan dapat lebih memberikan kesempatan kepada seluruh calon siswa untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan berkualitas dengan tetap mengedepankan kemampuan dari calon siswa. Banyak faktor yang menyebabkan sebuah sekolah memiliki kualitas lebih baik dibandingkan dengan sekolah lainnya, diantaranya ketersediaan tenaga pendidik yang profesional, sarana dan prasarana pendukung bagi proses pendidikan para siswanya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa dengan adanya kebijakan system zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) khususnya pada tingkat SMP di Kota Tasikmalaya menimbulkan fenomena baru, yaitu terjadinya pindah alamat terhadap calon siswa didik baik pindah alamat ke pihak keluarga, kerabat maupun pihak lainnya yang berdekatan dengan sekolah tujuan. Terjadinya praktek-praktek dengan melibatkan pihak-pihak lain diluar ketentuan dalam proses PPDB dengan memaksakan seorang siswa dapat diterima ke sekolah tujuan yang tentunya menjadi persoalan tersendiri bagi sekolah yang dituju dikarenakan tidak memenuhi ketentuan yang berlaku

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rozak (2021). Kebijakan Pendidikan di Indonesia. <https://jurnal.kopertais1.or.id/alim/article/download/218/191/>
- Diem, Sarah, Michelle D. Young Anjele D. Welton, Katherine Cumings Mansfield & Pei-Ling Lee, The intellectual landscape of critical policy analysis, London: International Journal of Qualitative Studies in Education Vol 27 No. 9 pp 1068-1090. <http://dx.doi.org/10.1080/09518398.2014.916007>.

- Dye, Thomas R. (1972). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall at 2.
- Fadiyah Elwijaya, dkk. (2021). Konsep dasar kebijakan pendidikan. <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>
- Pal, Leslie A. (2013). *Beyond Policy Analysis – Public Issue Management in Turbulent Times* (5th Ed.). Toronto: Nelson Education, at 414.
- Tilaar, H.A.R dan Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka. Belajar.